



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Studi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara)

Septony B. Siahaan dan Arthur Simanjuntak

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2020

Disetujui November 2020

Dipublikasikan Desember 2020

Keywords:

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah; Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan; Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan Kualitas Laporan Keuangan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kepala dan staf BPKAD di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Metode penentuan sampel menggunakan metode convenience sample. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara.

PENDAHULUAN

Pengertian akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 9 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah menguatnya akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga publik yang berada di pusat maupun di daerah.

Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*) (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode. Maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang

dimiliki staf akuntansi sendiri, maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif, dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Udiyanti, dkk, 2014).

Perbedaan hasil penelitian pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu menurut Sari, dkk (2014) yang menghasilkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, berbeda dengan hasil penelitian Inapty dan Martiningsih (2016) bahwa pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan hasil penelitian pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan yaitu menurut Yuliani, dkk (2010) bahwa pemanfaatan SIKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian Artana (2016) menghasilkan bahwa pemanfaatan SIKD tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan hasil penelitian pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan yaitu menurut Afifah dan Dien (2014) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Yensi, dkk. (2014) bahwa sistem pengendalian

internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

TELAAH TEORI

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan, dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya apabila laporan keuangan tersebut mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah:

Relevan (*Relevant*)

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Andal (*Reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan

kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dapat Dibandingkan (*Comparability*)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

Dapat dipahami (*Understandability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memanfaatkan teknologi informasi yang menghasilkan suatu sistem informasi yang menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang dapat diakses, dikelola dan didayagunakan oleh berbagai pihak dan masyarakat luas. Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah:

“Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.”

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup:

- a) APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b) Neraca Daerah;
- c) Laporan Arus Kas;
- d) Catatan atas Laporan Keuangan Daerah;
- e) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- f) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
- g) Data yang berkaitan dengan Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, penyelenggaraan SIKD mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan standar informasi keuangan daerah;
- b) Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
- d) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
- e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
- f) Pembukuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan aplikasi dan pertukaran informasi;
- g) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, pemerintah daerah menyelenggarakan SIKD di daerahnya masing-masing dengan tujuan:

- a) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- c) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- d) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- e) Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat;
- f) Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2005, Penyelenggaraan SIKD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD). Dalam hal penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud bahwa DJPKPD menyusun standar evaluasi informasi keuangan daerah, pengumpulan dan pengolahan serta validasi dalam penyajian data informasi keuangan daerah, penyiapan rumusan kebijakan teknis evaluasi penyajian informasi keuangan daerah, dan penyiapan rekomendasi evaluasi informasi keuangan daerah bagi Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada Dewan Perimbangan Otonomi Daerah.

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar

organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Wulandari dan Muhammad, 2014). Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan merupakan sebuah proses untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006).

Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan lainnya, maka aparat pengawasan internal memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal (hubungan sebab akibat) (Siahaan & Simanjuntak, 2018) dimana jika variabel dependen dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen tertentu, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y (Erlina, 2011). Penelitian asosiatif kausal adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara berjumlah 52 orang responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*.

Dalam hal ini peneliti menetapkan sampel penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Labuhan Batu Utara berjumlah 28 orang responden. Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya

untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2016). Peneliti mengolah data penelitian menggunakan aplikasi SPSS 23 (*Statistical Package for Social Sciences*). Model yang digunakan dalam penelitian ini ialah model regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Data

Uji Validitas

Pedoman suatu instrumen/pertanyaan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai minimum r_{tabel} adalah 0,30. Hasil menunjukkan bahwa uji validitas dari empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan 28 sampel responden menunjukkan variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan. Variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan. Variabel sistem pengendalian internal mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai kriteria valid untuk setiap pertanyaan.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha berada di atas 0,7. Berdasarkan hasil olahan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sebesar 0,94; sistem pengendalian internal sebesar 0,87; pemahaman standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,91; dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,89. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan yang digunakan mampu

memperoleh data yang konsisten yang berarti apabila pertanyaan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas terhadap residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tingkat signifikansi yang digunakan α : 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah melihat angka probabilitas p , dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2013). Diketahui nilai probabilitas p atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,816. Karena nilai probabilitas p , yakni 0,816, lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas dipenuhi.

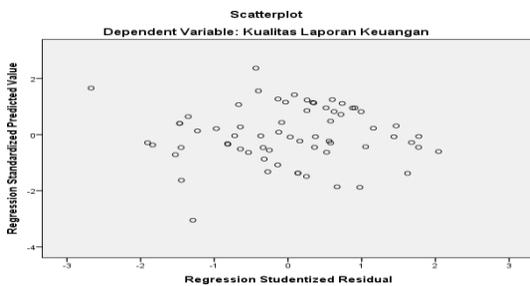
Uji Multikolinieritas

Deteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil analisis nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *variance inflation factor* < 10 untuk setiap variabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji.

Uji Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Ghozali (2013) menyatakan dasar analisis adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 1. Scatterplot

Terlihat pada gambar di atas bahwa tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Nilai adjusted R² sebesar 0,591. Hal ini menandakan bahwa variasi variabel pemanfaatan SIKD, pemahaman SAP, dan SPI dapat menjelaskan 42,9% variasi variabel kualitas LKPD. Sedangkan sisanya, yaitu 57,1 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini, misalnya variabel pelatihan, pengalaman kerja, dan kompetensi sumber daya manusia.

Uji Statistik F

Hasil uji signifikan simultan (uji statistik F) dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Berikut ini merupakan hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F).

Tabel 1. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	424.588	3	141.529	17.301	.000 ^b
Residual	507.185	24	8.180		
Total	931.773	27			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), SPI, Pemahaman SAP, Pemanfaatan SIKD

Nilai $df_1 = n - k = 4 - 1 = 3$, nilai $df_2 = n - k - 1 = 24$ (jumlah pengamatan yaitu 28 - 3

- 1). Berdasarkan Tabel 1, diketahui nilai F_{hitung} adalah 17.301, nilai F_{tabel} adalah 2.75, dan nilai signifikansi adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} > F_{tabel} dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya adalah pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan.

Uji Statistik t

Hasil uji statistik t untuk variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal. Jika nilai signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima.

Berdasarkan uji t diperoleh hasil pengujian bahwa variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai t sebesar 3,859 dan nilai signifikan sebesar 0,000; variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah memiliki nilai t sebesar 2,492 dan nilai signifikan sebesar 0,42; variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t sebesar 5,114 dan nilai signifikan sebesar 0,000.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, dan variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan hasil di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- c) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- d) Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran bagi peneliti lain agar mencari variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh kompetensi auditor, independensi auditor, integritas auditor dan profesionalisme auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada antor akuntan publik di Kota Medan). *Jurnal Manajemen*, 5(1), 81–92.

Afiah, Nunuy Nur, dan Dien Noviany Rahmatika, 2014. “Factors Influencing The Quality of Financial Reporting And Its Implications on Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia)”, *International Journal of*

Business, Economics and Law, Vol. 5. hal. 111-121.

Artana, Arlia Sari, 2016. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Erlina, 2011. *Metode Penelitian*. Medan: Penerbit USU Press.

Erlina dan Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Inapty, M. Ali Fikri Biana Adha, dan RR. Sri Pancawati Martiningsih, 2016. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 9 (1).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Sari, Ni Putu Yogi Merta Maeka, I Made Pradana Adiputra, dan Edy Sujana, 2014.” Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas- Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)”, E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Volume 2 No. 1.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2018). Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah (Studi kasus pada inspektorat provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Manajemen*, 4(2), 153–161.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, 2014. “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)”. *Jurnal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 2, No. 1.
- Yensi, Desy Sefri, Amir Hasan, dan Yuneita Anisma, 2014. “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupatean Kuantan Singingi)”, *J OM FEKON*, Vol. 1 No.1.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Usman Bakar, 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Kaeuangan Pemerintah Daerah (Studi pada pemerintah Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Volume 3 No. 2 hal 206-220, 2010.

Wulandari dan Muhammad, 2014. Teori,
Konsep, dan Aplikasi Sektor Publik.
Jakarta: Salemba Empat.